

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA BULUKANDANG KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN (Studi Kasus Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)

Sonya Puspitasari, Aminullah
Universitas Yudharta Pasuruan

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2024

Revised September 2024

Accepted September 2024

Available online September 2024

Email :

Sonyapuspita124@gmail.com,
aminullah@tudharta.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Program BLT yang dilaksanakan di desa Bulukandang merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Pelaksanaan BLT di desa Bulukandang melibatkan beberapa petugas, serta koordinasi antara pemerintah desa. Pada tahun 2023 sebanyak 38 orang mendapatkan BLT, program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan blt dan juga untuk mengetahui kendala implementasi. Dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana implementasi program blt di desa bulukandang dan yang kedua yaitu apakah yang menjadi kendala dalam implementasi blt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program kebijakan blt dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi van meter dan van horn yang terdiri dari 6 indikator yaitu: (1) standart kebijakan dan sasaran program/tujuan (2) sumberdaya (3) komunikasi (4) karakteristik (5) lingkungan social,ekonomi,politik (6) sikap/ disposisi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator berjalan dgn baik, namun beberapa indicator perlu dikaji lebih mendalam yaitu pada indicator standar kebijakan dan sasaran program/tujuan dan juga sumberdaya waktu yang perlu dikembangkan lagi.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program BLT, Administrasi Publik

ABSTRACT

The BLT program implemented in Bulukandang village is one of the government's programs to help poor communities. The implementation of BLT in Bulukandang village involved several officers, as well as coordination between the village government. In 2023 as many as 38 people will receive BLT, this program is expected to reduce poverty levels and improve community welfare.

This research focuses on the implementation of the BLT policy and also to determine the obstacles to implementation. With the first problem formulation, namely how to implement the BLT program in Bulukandang village and the second, namely what are the obstacles in implementing BLT. The aim of this research is to find out how the BLT policy program is implemented using qualitative research methods. The data collection methods used are interviews, observation, documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions.

This research uses van meter and van horn implementation theory which consists of 6 indicators, namely: (1) policy standards and program targets/objectives (2) resources (3) communication (4) characteristics (5) social, economic and political environment (6) attitude/disposition.



The results of the research show that several indicators are working well, but several indicators need to be studied in more depth, namely standard policy indicators and program targets/goals and also time resources that need to be developed further.

Key words: Policy implementation, BLT program, public administration

Pendahuluan

Menurut organisasi perdagangan dunia (wto) indonesia merupakan negara maju, namun *human developmet index* atau indeks pengembangan manusia yang disusun pbb menunjukkan bahwa indonesia sebagai negara berkembang. hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan masyarakat indonesia, masyarakat indonesia sendiri pada saat ini masih banyak menghadapi permasalahan sosial dalam upaya berkembang salah satunya yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di indonesia sudah menjadi rahasia publik, dikarenakan tingkat kemiskinan di indonesia yang masih sangat tinggi. kemiskinan di indonesia terjadi karena beberapa faktor yaitu upah minimum yang tidak memadai, taraf kehidupan masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran yang setiap tahun bertambah tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. larasati prayoga et al. (2021).

Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan juga kesehatan. chambers (dalam nasikun) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) ketersaingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. kemiskinan merupakan permasalahan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah karena Permasalahan Ini Sudah Menjadi Persoalan Sejak Lama, kondisi kemiskinan dapat juga disebabkan oleh beberapa hal salah satunya yaitu kurangnya ketersediaan kebutuhan, meningkatnya angka pengangguran dan juga terbatasnya akses terhadap pendidikan dan juga kesehatan. kemiskinan menjadi sebuah hal yang global yang dialami semua negara. salah satu penyebab kemiskinan di indonesia yang terjadi pada tahun 2020 yaitu munculnya virus covid-19.

(Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)) nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2019 nomor 11 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga miskin di desa. Program BLT pertama kali diberikan kepada masyarakat pada tahun 2005 di era pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono (SBY), program blt pada saat itu diselenggarakan sebagai respons terhadap peningkatan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan harga pangan naik sedemikian rupa sehingga banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pada tahun 2020 bantuan langsung tunai (BLT) hal ini disebabkan oleh wabah covid yang berdampak pada masyarakat salah satunya yaitu banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) merupakan bantuan yang diadakan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak covid-19 di desa. Pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) diatur secara khusus melalui peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN, dimana dalam peraturan tersebut desa wajib menyelenggarakan bantuan langsung tunai (BLT) paling sedikit 40% dari jumlah maksimum dana desa yang diterima.

Dalam peraturan menteri keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa tahun 2023. Calon keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat a diprioritaskan akan diberikan kepada keluarga miskin yang tinggal di desa terkait yang terdaftar pada desil keluarga pertama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam artian masyarakat yang paling rentan tidak menerima bantuan lainnya seperti PKH, bansos dan bantuan lainnya. Penerima bantuan langsung tunai sesuai dengan peraturan



desa 6 tahun 2020 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam formulir pendataan, adapun kriteria penerima bantuan langsung tunai sebagai berikut:

1. Luas lantai <8m²/orang
2. Lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murah
3. Dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu murah/ tembok tanpa plester
4. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar tanpa fasilitas/ bersama orang lain
5. Tidak adanya fasilitas penerangan tanpa listrik
6. Sumber air minum dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan
7. Bahan bakar kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Konsumsi daging/ susu/ ayam hanya 1 kali/ minggu
9. Hanya mampu membeli satu stel pakaian setahun
10. Hanya mampu makan 1-2 kali/hari
11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kk petani berlahan <500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah <600 ribu/bulan
13. Pendidikan kk tidak sekolah/ tidak tamat sd/ tamat sd
14. Tidak memiliki tabungan/ barang mudah dijual minimal rp500 ribu

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal menanggulangi kemiskinan, oleh karena itu pemerintah melakukan beberapa usaha agar kemiskinan di desa dapat teratasi. salah satunya dengan cara adanya program bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah mempunyai peran strategis dalam membentuk kebijakan yang mendukung keberlanjutan, ekonomi inklusif, dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan diartikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi arah dan landasan rencana kerja dan pengelolaan. Kebijakan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebagai mana van meter dan van horn dalam budi (winarno, 2016) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Dalam peraturan menteri keuangan RI Tahun 2021 pasal 1 yang dimaksud bantuan langsung tunai (BLT) adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa, pembagaian dana blt diberikan setiap bulan dengan jumlah RP100.000 per/kpm. manfaat dari pembagaian bantuan langsung tunai yaitu:

1. Untuk mengurangi beban keluarga miskin/ tidak mampu
2. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat miskin
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

Dana bantuan langsung tunai (BLT) merupakan program pemerintah yang diberikan untuk masyarakat yang sama sekali tidak menerima bantuan jenis lainnya seperti PKH, bansos. Oleh karena itu bagi masyarakat yang menerima bantuan program lainnya tidak akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan jenis lainnya. Peserta bantuan langsung tunai (BLT) merupakan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dan telah ditetapkan oleh badan pusat statistik. Program ini dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan, untuk memenuhi kebutuhan pangan, untuk pendidikan dan juga kesehatan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keadaan kehidupan masyarakat yang tercermin dalam taraf hidup masyarakat tersebut. menurut badan pusat statistik (BPS), kesejahteraan digunakan untuk mempermudah penafsiran, perubahan kesejahteraan dinilai dalam delapan bidang, termasuk kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, lapangan kerja, tingkat dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan hidup, kemiskinan dan isu-isu sosial lainnya yang menjadi tolak ukur bagi upaya perbaikan, kualitas pekerjaan dan juga kehidupan.

Di Indonesia tingkat kemiskinan dapat terjadi di perkotaan maupun perdesaan, untuk mengukur kemiskinan, bps menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Menurut data badan pusat statistik (bps) Kabupaten Pasuruan menemukan adanya kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,28 persen di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023, hingga presentase pada tahun ini menjadi 9,24 persen dari sebelumnya 8,86 pada tahun 2022. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di Desa Bulukandang jumlah penduduk miskin menurun, dapat dilihat dari jumlah penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) yang terjadi setiap tahunnya. Desa Bulukandang Kecamatan Prigen merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Pasuruan, menurut data idm yang diperoleh pada tahun 2020-2023 Desa Bulukandang termasuk desa dengan status maju.

tabel 1. 1 jumlah penerima blt

No	Jumlah penerima bantuan langsung tunai	Tahun
1.	138 orang	2020
2.	138 orang	2021
3.	138 orang	2022
4.	38 orang	2023

sumber: data penerima manfaat bantuan langsung tunai

Dengan adanya program bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. tentu saja dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap bantuan langsung tunai ini akan meningkatkan respons masyarakat.

Desa Bulukandang merupakan desa yang telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dimana BLT-DD diatur melalui peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN dimana dalam peraturan tersebut desa wajib menyelenggarakan 40% dari jumlah maksimum dana desa yang diterima. dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tersebut terdapat beberapa permasalahan yang muncul.

Berdasarkan hasil peneliti dilapangan dan hasil wawancara dengan beberapa staf di desa bulukandang, peneliti menemukan beberapa indikasi dalam implementasi bantuan langsung tunai (BLT) yang di antara lain dalam sasaran program BLT yang seharusnya diberikan sesuai dengan kriteria namun, kenyataannya 50% dari masyarakat miskin belum mendapatkan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa sendiri masih menggunakan data tahun sebelumnya dan belum memperbarui data setiap tahunnya. Hal tersebut yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat.

Pada indicator sumber daya waktu dalam penyaluran tidak terjadwalkan. Hal ini yang dirasa warga tidak berjalan dengan baik. Dari pemerintah desa sendiri juga tidak ada sosialisasi kepada masyarakat terkait jadwal pembagian bantuan langsung tunai (BLT).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba melihat bagaimana implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) di desa bulukandang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh van meter dan van horn yang memiliki 6 indikator yaitu: standart kebijakan dan sasaran program, sumber daya manusia (sdm), komunikasi, karakteristik, lingkungan social, ekonomi, dan politik, sikap atau disposisi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian dengan judul "**implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (blt) di desa bulukandang kecamatan prigen kabupaten pasuruan**".



Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yang artinya yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara, pengamatan secara langsung dan juga mendeskripsikan objek secara mudah dipahami, serta menjelaskan penyebab suatu fenomena.

Sementara itu, menurut McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015), pemilihan metode kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu memandang suatu hal tertentu. Dalam hal ini sangat penting bagi peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menjamin kualitas proses penelitian, karena peneliti menafsirkan data yang dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha menggambarkan secara tepat dan akurat fenomena yang terjadi secara langsung, akurat dan sistematis berdasarkan fakta yang ada dilapangan melalui pengumpulan, penjelasan, dan pendataan yang objektif.

Fokus Penelitian

Focus penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Yang dirancang untuk memungkinkan peneliti membatasi studi kualitatif sesuai dengan signifikansi masalah yang dihadapi. Penelitian ini mengkaji pada program BLT di desa bulukandang. Penelitian ini memiliki dua focus yang pertama untuk melihat implementasi kebijakan dan yang kedua untuk mengetahui kendala dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dapat diukur dari aspek berikut: (1) standar kebijakan dan sasaran, (2) sumber daya manusia (SDM), (3) komunikasi, (4) karakteristik, (5) keterlibatan lingkungan social, (6) sikap atau disposisi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Jl. Indrokilo, Bulukandang, Kecamatan Prigen, Pasuruan

Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik secara sunstantif maupun formal.

a. Pengumpulan Data

Informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu, seskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif merupakan catatan yang wajar (catatan mengenai apa yang peneliti lihat, dengar, akui dan alami tanpa adanya masukan atau penafsiran peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang memuat kesan, komentar, pendapat, dan penafsiran peneliti terhadap temuan dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan tektik wawancara dengan beberapa sumber yang relevan, antara lain:

- 1). Kepala desa Bulukandang, sebagai pemangku kepentingan di wilayah desa Bulukandang
- 2). Perangkat desa Bulukandang, sebagai pelaksana program bantuan langsung tunai

b. Reduksi data

Setelah pengumpulan data dilakukan reduksi data untuk memilih data yang relevan dan bermasalah, momfokuskan data yang mengarah pada pemecah masalah, penemuan, makna, atau menjawab pertanyaan penelitian. Menyederhanakan dan kemudian atur secara sistematis dan jelaskan poin-poin terpenting dari temuan dan signifikansinya. Dengan kata lain, reduksi data digunakan untuk analisis yang mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan dan membuang hal-hal yang tidak relevan serta mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Yang meliputi implementasi menurut van

meter dan van horn (1) standart kebijakan dan sasaran program/tujuan,(2) sumberdaya, (3) komunikasi, (4) karakteristik, (5) lingkungan social, ekonomi, politik, (6) sikap/ disposisi

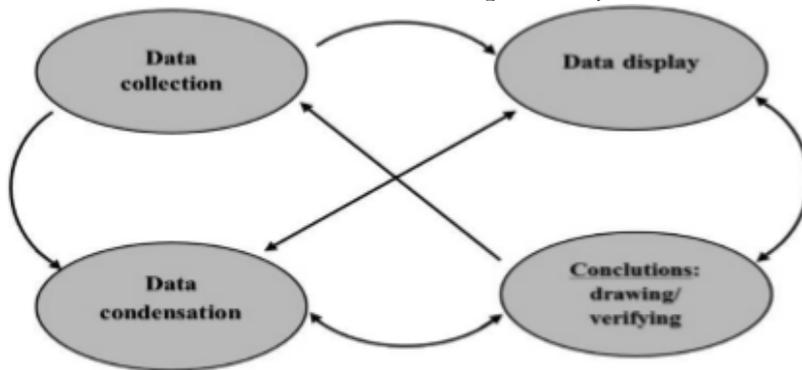
c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau dalam bentuk kata-kata, gambar, grafik dan table. Tujuan adalah untuk menggabungkan informasi sedemikian rupa sehingga menggambarkan situasi yang terjadi. Data yang penulis sajikan yaitu bagaimana implementasi bantuan langsung tunai (BLT) di desa Bulukandang

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan diambil pada saat proses penelitian, seperti pada proses reduksi data. Apabila bahan yang terkumpul sudah cukup maka ditarik kesimpulan sementara, bila data benar-benar lengkap barulah ditarik kesimpulan akhir. Dalam penelitian ini menggunakan tiga Teknik yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan tidak hanya berbentuk dokumen, melainkan juga hasil wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari beberapa informan dan juga hasil dokumentasi.

Proses analisis data secara interaktif dapat disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Sumber: Miles Huberman and Saldana (2014).

Hasil dan Pembahasan

Faktor kendala Implementasi bantuan langsung tunai (BLT)

Berikut adalah factor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) di desa Bulukandang sebagaimana di sampaikan oleh bapak Muhaimin pada indicator standar kebijakan dan sasaran program/ tujuan:

"menurut saya yang menjadi kendala yaitu kondisi masyarakat yang mengalami perubahan sehingga pihak desa kesulitan untuk memastikan".

Menurut bapak Muhaimin dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala selama ini yaitu dalam proses pendataan, karena kondisi yang mengalami perubahan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh sekdes sebagai pelaksana program bantuan langsung tunai. Adapun hasil wawancara selanjutnya pada indicator sumberdaya:

"jadi memang kalau pembagian BLT ini ada tahapannya ada beberapa jadi, tidak mesti tidak tentu tanggalnya tapi pasti kita berikan dengan jumlah yang sesuai. Akan tetapi, kami berharap masyarakat memanfaatkan bantuan dengan semestinya".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BLT terdapat tahapan dalam pembagiannya. Selanjutnya hasil wawancara pada indicator komunikasi:

"jadi memang kurangnya sosialisasi yang dilakukan dengan pihak-pihak sehingga masyarakat merasa bahwa program ini belum sepenuhnya berjalan"

Adapun hasil wawancara dengan bapak Wahi selaku kepala desa Bulukandang:

"kalau dulu kendalanya banyak masyarakat yang belum mempunyai KK, KTP sehingga pihak desa sendiri kesulitan untuk memberikan bantuan karena syaratnya harus ada KK dan juga KTP jadi pihak desa sendiri juga harus siap membantu masyarakat".

Seperti apa yang telah disampaikan bapak Wahi bahwasannya kendalanya yaitu pada masyarakat sendiri yang tidak memiliki KK, KTP sehingga pihak desa masih harus menyiapkan persyaratannya. Adapun hasil wawancara selanjutnya pada indicator lingkungan social, ekonomi, politik:

“kalau dari masyarakat sendiri memang banyak yang masih tidak sadar, masih banyak yang protes apalagi kalau tetangganya dapat sampai ada yang ke balaidesa menanyakan kok aku gaoleh bantuan maneh pak padahal tahun wingi oleh (kok saya gak dapat bantuan lagi padahal tahun kemarin dapat. Kami dari pihak desa sendiri kalau ada hal seperti ini Cuma bisa menjekaskan dan menasehati saja”.

Seperti apa yang telah disampaikan bahwa masyarakat tidak memiliki kesadaran sepenuhnya. Hasil wawancara selanjutnya pada indicator sikap / disposisi:

“dari masyarakat sendiri yang masih mengharapkan bantuan ini sehingga ini yang menjadi kesulitan bagi pemerintah desa”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dari

Analisis Interpretasi

Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT)

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut purwanto dan sulistyastuti implementasi pada hakekatnya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seseorang pelaksana (untuk menyampaikan keluaran kebijakan) kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakn tersebut.

Sedangkan implementasi sebagaimana didefinisikan oleh van meter van horn, adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, Lembaga pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam beberapa keputusan.

Model Implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh van meter dan van horn disebut dengan A Model Of Policy Implementation (1975). Proses implemetasi abstraksi atau hasil implementasi kebijakan, yang pada hakikatnya dilaksanakan dengan sengaja untuk mencapai efisiensi implementasi kebijakan yang tinggi yang muncul dalam kaitanya dengan berbagai variable. Van meter dan van horn dalam Budi (Winarno,2016) juga mendefinisikan implementasi kebijakan public sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan salah satu program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin guna untuk mengurangi angka kemiskinan, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti mencoba untuk melihat Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Bulukandang dengan menggunakan teori Van Meter Van Horn yang terdapat 6 faktor yang mempengaruhi berhasil dan tidaknya sebuah implementasi kebijakan yaitu standar kebijakan dan sasaran program, sumberdaya, komunikasi, karakteristik, lingkungan social ekonomi dan politik, sikap / disposisi:

Standar kebijakan dan sasaran program/tujuan

Menurut pendapat van meter dan van horn standar kebijakan dan sasaran program/kebijakan yang akan dicapai, baik terwujud maupun tidak terwujud. Dalam jangka pendek, menengah dan jangka Panjang haruslah terukur secara jelas. Standar kebijakan juga harus memiliki tujuan yang jelas dan konsisten. Artinya seluruh pelaksana harus mempunyai yang sama terhadap tujuan kebijakan.

Dalam menghadapi masa pandemic covid-19, banyak masyarakat di Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan dan mengakami peningkatan kemiskinan. Dalam mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk mengimplementasikan program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai upaya mendesak untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dengan begitu bantuan langsung tunai ini harus diimplementasikan sesuai dengan standar kebijakan dan sasaran program / tujuan.



Program bantuan langsung tunai ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan mendukung stabilitas ekonomi selama masa krisis.

Dengan adanya program bantuan langsung tunai ini diharapkan memberikan dampak positif berupa peningkatan daya beli masyarakat, penurunan angka kemiskinan, dan perbaikan akses terhadap kebutuhan dasar.

Kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam keadaan krisis ekonomi. Bantuan langsung tunai dibuat untuk memberikan bantuan finansial secara langsung kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dan mendukung daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Indicator standar kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa program dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil observasi penelitian dalam indicator standart kebijakan ada beberapa aspek yang terkandung didalamnya. Dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini:

Bahwa dalam standar kebijakan, pemerintah desa telah menggunakan standar yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2020. Dan juga dalam pendataan pemerintah desa bulukandang bekoordinasi dengan ketua RT / RW untuk melakukan survey terhadap masyarakat.

Pemerintah desa melibatkan seluruh jajaran perangkat desa untuk dapat memastikan bahwa data calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) tersebut valid.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan program pemerintah yang dikhususkan bagi masyarakat miskin untuk dapat membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Kelompok sasaran dari program bantuan langsung tunai ini adalah masyarakat miskin, pekerja informal yang kehilangan pekerjaan, dan kelompok rentan lainnya yang terdampak langsung oleh pandemic.

Dalam hal penyaluran bantuan langsung tunai, pemerintah desa Bulukandang telah mengimplementasikan sesuai dengan peraturan Menteri RI Nomor 14 tahun 2020. Akan tetapi menurut masyarakat dari jumlah penerima bantuan langsung tunai sebanyak 38 orang pada tahun 2023 terdapat 5 orang masyarakat miskin yang belum mendapatkan. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Masyarakat yang merasakan bahwa kurang lebih 5 orang yang hidupnya pas-pasan namun belum mendapatkan bantuan.
- b. Bantuan yang seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan namun kenyataannya ada dari mereka yang tidak merasakan manfaat
- c. Bantuan langsung tunai (BLT) yang seharusnya menjadi solusi untuk mengurangi beban hidup namun saat program bantuan tidak merata justru menjadi rasa kekecewaan masyarakat.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat belum merasakan bahwa program bantuan langsung tunai berjalan dengan baik. Karena BLT yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin namun banyak dari mereka yang tidak mendapatkan, sedangkan masyarakat yang hidupnya layak masih mendapatkan bantuan.

Kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan bantuan langsung tunai untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif bagi penerima manfaat.

Tujuan dari program ini meliputi peningkatan pendapatan rumah tangga penerima bantuan, penurunan presentase kemiskinan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan Pendidikan.



Berdasarkan observasi dan wawancara pemerintah desa Bulukandang kecamatan prigen telah menyalurkan bantuan langsung tunai sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tidak pernah menerima bantuan jenis lainnya.

Namun berdasarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat bahwa program bantuan langsung tunai ini belum sepenuhnya sesuai. Program bantuan yang seharusnya dirasakan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, namun dengan adanya ketidaksesuaian membuat masyarakat miskin tidak merasakan bantuan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa, program bantuan langsung tunai belum terlaksana sepenuhnya. Seharusnya dengan penerapan kebijakan yang tepat seluruh masyarakat miskin Bulukandang dapat merasakan bantuan langsung tunai dengan hasil yang sama rata.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) yang dilihat dari indicator standar kebijakan dan sasaran program/tujuan terdapat ketidaksamaan pendapat antara warga dan pemerintah desa. yang aertinya, program belum terimplementasikan dengan baik.

Sumberdaya

Implementasi sumberdaya merupakan sebuah langkah yang menentukan untuk mencapai tujuan organisasi. Proses dalam implementasi sumberdaya melibatkan perencanaan yang matang, pengalokasian yang tepat, dan penggunaan yang efisien seperti finansial, teknologi dan material. Tetapi apabila pelaksanaan kebijakan kekurangan sumberdaya untuk melakukan suatu implementasi kebijakan, maka implementasi tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

Sumberdaya adalah sumberdaya manusia dan non manusia lainnya yang mendukung implementasi kebijakan public. Van Meter dan Van horn menekankan bahwa tanpa sumberdaya yang memadai, bahkan kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun dapat gagal dalam tahap implementasi. Sumberdaya ini harus dikelola dengan baik dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, factor pendukung sumber daya menjadi bagian penting jika ingin tercapai implementasi dengan tersedianya pekerja, kewenangan yang dimanfaatkan serta kelengkapan sarana dan prasarana sebagai factor sumber daya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat dalam indicator sumberdaya dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) terdapat dua sumberdaya yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya waktu. Dalam sumberdaya manusia pemerintah desa melibatkan seluruh perangkat desa. Dalam hal pelaksanaan pemerintah desa sendiri sudah bisa dikatakan sangat baik dalam melakukan tugasnya terhadap masyarakat.

Sumberdaya manusia yang telah dilakukan pemerintah desa Bulukandang selama ini adalah pemerintah desa yang secara langsung menjalankan program bantuan langsung tunai dari awal hingga selesai, dalam hal ini pemerintah desa telah membagi tugas masing-masing, mulai dari awal pendataan calon penerima, penyampaian informasi terhadap warga. Pemerintah desa Bulukandang sendiri dalam hal ini sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan kemampuan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.

Peran pemerintah desa dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya sebuah program. Oleh karena itu, pemerintah desa Bulukandang melakukan berbagai upaya dalam menjalankan program bantuan langsung tunai ini. Seluruh perangkat desa ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan program BLT ini.

Pemerintah desa Bulukandang juga telah mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Hal ini yang dirasakan oleh masyarakat yang merasa sangat terbantu oleh beberapa perangkat desa yang telah menjembatani selama proses bantuan langsung tunai (BLT) ini berlangsung.

Dalam menjalankan program bantuan langsung tunai Pemerintah desa Bulukandang juga telah melaksanakan berbagai upaya untuk menjalin kerjasama dengan beberapa pihak seperti babinkamtibmas, babinsa, pendamping desa, pendamping kecamatan dan juga TNI, Polri. Selain itu, perangkat desa telah menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Hal ini



dilakukan untuk dapat memudahkan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Yang artinya, semua pemerintah desa berpartisipasi dan juga ikut serta dalam mengimplementasikan program BLT dengan baik.

Sedangkan dalam segi sumberdaya non manusia (waktu) desa Bulukandang telah menyalurkan bantuan langsung tunai ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Akan tetapi jika dilihat dari hasil peneliti yang dilakukan peneliti bahwa dalam waktu penyaluran bantuan langsung tunai yang dirasa warga kurang efektif. Hal ini terjadi karena BLT diberikan tidak mesti setiap bulannya.

Pembagian bantuan langsung tunai di desa Bulukandang ini melalui beberapa tahapan. Pemerintah desa sendiri dalam hal ini juga mengakui bahwa pembagian bantuan langsung tunai ini tidak dapat dipastikan waktu dan tanggalnya. Akan tetapi pemerintah desa dapat memastikan bahwa bantuan langsung tunai ini tetap tersalurkan dengan jumlah yang semestinya.

Dengan adanya pemberian bantuan oleh pemerintah terhadap masyarakat miskin diharapkan dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga dapat mensejahterakan masyarakat. Dan juga masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan juga diharapkan dapat menggunakan bantuan sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

Komunikasi

Komunikasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam konteks implementasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi yang jelas dan tepa tantara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, serta antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi ini.

Dalam komunikasi yang baik dapat memastikan kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik. Komunikasi sendiri berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta memungkinkan adaptasi dan penyesuaian berdasarkan kondisi lapangan.

Dalam indikator komunikasi dalam program bantuan langsung tunai (BLT) mengacu pada cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait bantuan langsung tunai (BLT) kepada penerima manfaat. Indikator komunikasi yang efektif sangat penting untuk dapat memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan informasi yang akurat.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan program Bantuan langsung tunai dalam indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik. Dengan penerapan system komunikasi yang efektif, informasi dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari cara pemerintah desa Bulukandang yang telah menyampaikan tahapan informasi kepada calon penerima bantuan dengan memberikan surat undangan.

hal ini dirasa cukup efektif menurut pemerintah desa. Karena undangan tersebut menjadi salah satu dari ke tiga syarat pengambilan bantuan langsung tunai. Bagi masyarakat yang tidak membawa surat undangan, pemerintah desa Bulukandang tidak akan memberikannya. Hal ini diterapkan untuk menghindari penyalahgunaan.

Pemerintah desa Bulukandang juga telah melakukan tahapan komunikasi dan koordinasi mulai dari ketua RT/RW dan kasun dalam pendataan warga yang kemudian kepala dusun melakukan musdus untuk dapat memastikan data. Seluruh perangkat desa juga melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas. Dengan adanya koordinasi yang baik antar perangkat desa dan juga masyarakat dapat memastikan bahwa data penerima bantuan langsung tunai (BLT) ini akurat dan tidak ada yang terlewat.

Pemerintah desa juga telah melakukan sosialisasi dengan seluruh perangkat desa terkait tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan dalam menjalankan program bantuan langsung tunai. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan agar seluruh pemerintah desa paham akan apa yang akan dilakukan. Dengan seperti itu lebih memudahkan petugas dalam bertugas dan juga mempercepat proses. Adanya jalur komunikasi yang jelas dan prosedur yang terstruktur seperti ini dalam membuat keputusan yang lebih akurat.

Dapat dilihat dari para pelaksana kebijakan dan juga koordinasi yang baik dengan berbagai pihak dan dengan adanya sosialisasi antar berbagai pihak. Sehingga memudahkan



dalam menjelaskan terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan. Perangkat desa juga selalu turun ke ruma warga untuk menjelaskan berbagai informasi terutama dalam persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengambilan bantuan. Dengan begitu memudahkan bagi masyarakat yang sudah berumur untuk mendapatkan informasi yang valid. Tidak hanya dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) yang dilihat dari indicator komunikasi telah terimplementasikan dengan baik.

Karakteristik

Menurut van meter dan van horn karakteristik merupaakn struktur birokrasi, kompetensi, dan komitmen dari Lembaga atau badan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Karakteristik adalah ciri-ciri atau elemen-elemen utama yang menentukan bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan dengan sukses.

Karakteristik merupakan komponen yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis variable yang relevan. Pada indicator karakteristik diperlukan untuk dapat memastikan bahwa memiliki teori yang valid.

Dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai, pemerintah desa Bulukandang sebagai pelaksana implementasi kebijakan dari hal kompetensi sudah terjamin dan diandalkan dalam penyaluran dan dalam evaluasi ditempat penyaluran. Dalam hal ini pemerintah desa tidak bekerja sendirian melaikan perangkat desa juga dibantu oleh beberapa anggota lainnya seperti TNI, polri, babinkamtibnas dan juga babinsa sebagai pendamping dalam penyaluran BLT. Dalam hal ini pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan bertugas penuh dalam menjalankan program bantuan langsung tunai (BLT). Mulai dari pendataan yang dilakukan RT/RW, dan musdus Bersama dengan ketua kasun setempat. Yang kemudian hasil musdus tersebut menghasilkan data.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa pemerintah desa Bulukandang telah melakukan:

- a. Pemerintah desa Bulukandang telah mempermudah pelayanan kepada warga dalam melakukan pelayanan pembuatan KK, KTP bagi masyarakat yang belum mempunyai, karena KK, KTP merupakan syarat pengambilan bantuan
- b. Pemerintah desa bekerjasama dengan beberapa pihak seperti TNI, polri dalam menjalankan tugasnya
- c. Pemerintah desa selalu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dan selalu memastikan bahwa BLT dapat bermanfaat bagi masyarakat

Dalam hal ini tugas TNI, polri ikut serta dalam program bantuan langsung tunai ini yaitu mengawasi jalannya program bantuan langsung tunai ini sebagai pejabat. Pihak TNI, polri juga sangat membantu pemerintah desa terutama pada saat pembagian bantuan langsung tunai. Dengan adanya berbagai pihak yang ikut serta dalam program BLT ini memudahkan dan juga mempercepat dalam pembagian ke masyarakat dan juga mempermudah jalanya bantuan ini.

Pemerintah desa Bulukandang telah menganggap bahwa program bantuan langsung tunai menunjukkan hasil yang baik. Karena banyak dari masyarakat miskin yang merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa selalu melakukan evaluasi untuk selalu memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan efektif.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) yang dilihat dari indicator karakteristik berhasil terimplementasikan dengan baik.

Lingkungan social, ekonomi, dan politik

Program bantuan langsung tunai (BLT) adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin. Terutama dalam situasi krisis



ekonomi/pandemic. Dalam implementasi bantuan langsung tunai tidak hanya dihubungkan pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan indicator social dan politik.

Lingkungan social, ekonomi, dan politik memiliki peran penting dalam mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut van meter van horn yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberikan bentuk dukungan, karakteristik para partisipan, ataupun juga tanggapan dan sifat opini dari public. Van meter van horn juga menekankan bahwa interaksi antara factor-faktor ini kompleks dan dapat mempengaruhi berbagai tahap proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian pada factor lingkungan social, ekonomi, dan politik yang perlu digunakan dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT).

Lingkungan social sangat berpengaruh terhadap implementasi bantuan langsung tunai (BLT). Masyarakat yang menjadi sasaran program BLT ini merupakan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan, memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar seperti Pendidikan dan kesehatan, dan seringkali hidup dibawah garis kemiskinan. Program bantuan langsung tunai ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung untuk dapat meringankan beban ekonomi masyarakat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh di desa Bulukandang sebagai tempat pelaksanaan program kegiatan penyaluran bantaun langsung tunai tersebut. Diketahui bahwa dalam factor social terlihat ada dampak yang cukup besar dari pengaruh yang terjalin dari pemerintah desa terhadap masyarakat.

Hal tersebut dapat terlihat dari pemerintah desa Bulukandang yang mempermudah dalam pengurusan kependudukan yang merupakan syarat dari pengambilan bantuan langsung tunai (BLT). Seperti yang diketahui bahwa syarat dalam penerima bantuan langsung tunai yaitu dengan membawa KK/KT dan juga surat undangan dari desa.

Dilihat dari sisi ekonomi, bantuan langsung tunai (BLT) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin, yang pada gilirannya diharapkan dapat membantu perekonomian. Dalam kondisi krisis ekonomi pada masa pandemic kemarin, banyak dari mayarakat yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan, sehingga program bantuan langsung tunai ini menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam menstabilkan ekonomi penduduk.

Selain itu, bantuan langsung tunai (BLT) juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) memerlukan dana yang besar yaitu desa wajib menyelenggarakan paling sedikit 40% dari jumlah maksimum dana desa yang diterima.

Dari factor ekonomi, seperti diketahui bahwa bantuan langsung tunai merupakan program bantuan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu masyarakat merasa sangat senang karena dengan adanya program bantuan langsung tunai mereka dapat merasakan bantuan. Jika dilihat dari keseluruhan bahwa di desa Bulukandang sudah minim kemiskinan, Akan tetapi banyak dari masyarakat yang tidak sadar bahwa bantuan langsung tunai ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Banyak dari mereka yang hidupnya sudah layak namun masih berprotes jika dirinya tidak mendapatkan. Akan tetapi pihak desa selalu mempertimbangkan dalam penentuan penerima nantuan untuk dapat mensejahterakan kehidupan warganya dan dalam penyaluran BLT ini agar tepat sasaran. Banyak dari mereka mengharapakan bantuan ini apalagi tahap pertama dapat akan tetapi tahap selanjutnya tidak dapat. Sehingga banyak dari mereka yang beranggapan bahwa peemrintah tidak adil.

Secara politik, implementasi bantuan langsung tunai (BLT) sering kali menjadi alat bagi pemerintah untuk meraih dukungan masyarakat. Program ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan bantaun langsung tunai ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya tanpa adanya penyalahgunaan.

Dari factor politik bahwa pihak pemerintah desa selalu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam penyaluran BLT untuk mempermudah pelaksanaan. Dalam hal ini pemerintah desa selalu melibatkan TNI, polri, babinsa, babinkamtibnas dan juga pihak-pihak terkait untuk dapat memastikan bahwa program ini berjalan dengan lancar. Tugas TNI, polri dalam hal ini juga ikut berpengaruh terhadap bantuan langsung tunai (BLT), mulai dari awal pendataan hingga selesainya penyaluran.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) yang dilihat dari indicator lingkungan social, ekonomi dan politik berhasil terimplementasikan dengan baik.

Sikap/disposisi

Sikap/disposisi merupakan cara seseorang merespons/berinteraksi terhadap situasi, peristiwa atau orang lain, yang dipengaruhi oleh nilai, kepercayaan dan pengalaman individu tersebut. Menurut van meter van horn, sikap/disposisi merujuk pada persepsi, keyakinan, dan evaluasi terhadap suatu objek, ide, atau situasi tertentu. Sikap ini penting dalam proses implementasi kebijakan karena mempengaruhi sejauh mana individu dan kelompok mendukung suatu kebijakan. Sikap/disposisi yang positif terhadap kebijakan dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi, sementara sikap yang negative dapat menghambatnya.

Sikap/disposisi dalam implementasi bantuan langsung tunai merupakan bagian penting dari kebijakan social-ekonomi yang bertujuan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Implementasi bantuan langsung tunai (BLT) memiliki dampak yang signifikan pada indicator sikap penerima bantaun dan masyarakat secara keseluruhan. Penerima bantuan langsung tunai (BLT) cenderung menunjukkan peningkatan rasa kepercayaan terhadap pemerintah, karena merasa bahwa kebutuhannya diperhatikan dan dipenuhi. Selain itu, bantuan langsung tunai ini juga dapat menumbuhkan sikap positif dan tanggung jawab social.

Melalui program bantuan langsung tunai (BLT), pemerintah berupaya meredam ketidakpuasan social dan mengurangi ketimpangan ekonomi, yang berpotensi meningkatkan kestabilan social. Bantuan yang tepat sasaran dan transparan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam program-program social lainnya, serta memperkuat rasa kesatuan dan persatuan bangsa.

Pada indicator disposisi merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pada indicator disposisi mencakup sikap, perilaku, dan penerimaan masyarakat terhadap program bantuan langsung tunai.

Dalam proses implementasi, penting untuk melakukan survey awal untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dilihat bahwa, dalam pelaksanaan program Bantuan langsung tunai pemerintah desa Bulukandang yang merupakan pelaksana kebijakan sudah memahami akan tujuan kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat miskin yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan jenis apapun. Sebagai pihak pelaksana pemerintah desa telah melakukan sesuai dengan tugas mereka.

Pada tahun 2023 pemerintah desa Bulukandang telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 38 orang. Bantuan langsung tunai tersebut diberikan sebagai bentuk atas kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin. Masyarakat sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya program BLT ini dan juga mereka beranggapan bahwa pemerintah telah meringankan beban hidupnya melalui pemberian bantuan secara tunai.

Pemerintah desa sendiri juga sangat memahami akan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah desa Bulukandang dalam penyaluran selalu berusaha merespon masyarakat dan memahami keluhan dari apa yang telah dihadapi masyarakat.

Pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan telah maksimal dalam penyaluran program bantuan langsung tunai. Hal itu dilakukan agar program bantuan langsung tunai berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang diketahui bahwa bantuan langsung tunai ini sangat diharapkan masyarakat agar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Program bantuan langsung tunai di desa Bulukandang sudah berjalan dengan baik dan juga respon pemerintah desa yang ada kemauan untuk tetap menjalankan program ini.

Faktor kendala implementasi program bantuan langsung tunai (BLT)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasi bantuan langsung tunai (BLT) di desa Bulukandang:

- a. Standar kebijakan dan sasaran program / tujuan: salah satu kendalanya adalah kesulitan dalam memastikan bahwa BLT diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat
- b. Sumber daya: pembagian BLT yang tidak tepat waktu, sehingga menjadi kendala dalam penyaluran
- c. Komunikasi: kurangnya koordinasi antar pemerintah terkait penerima BLT
- d. Karakteristik: yang menjadi kendala yaitu pada masyarakat yang belum mempunyai KK, KTP.
- e. Lingkungan social, ekonomi, politik: ketidakmerataan pembagian BLT yang menjadi konflik antar masyarakat.
- f. Sikap/disposisi: beberapa masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai tujuan dan mekanisme BLT.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dilapangan, maka dapat dilihat dari kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada indicator standar kebijakan dan sasaran program/tujuan terdapat masalah yaitu dengan adanya kurang lebih 15 orang yang belum tepat pada sasaran.
2. Pada indicator sumberdaya waktu dalam penyaluran yang tidak terjadwalkan
3. Pada indicator komunikasi telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan bahwa pemerintah desa telah melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat.
4. Pada indicator karakteristik telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
5. Pada indicator social,ekonomi,politik telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pemerintah desa yang telah menyalurkan BLT kepada masyarakat.
6. Pada indicator sikap/disposisi telah berjalan dengan baik. Hal ini karena pemerintah desa telah memahami akan tujuan penyaluran BLT.
7. Sedangkan pada factor kendala implementasi program bantuan langsung tunai di desa Bulukandang yaitu: kondisi masyarakat yang mengalami perubahan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat.

Daftar Pustaka

- 15 pengertian kebijakan publik menurut para ahli. (2021). Retrieved from www.gamedia.com:https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-punlik/
- Andi cudai nur, m. g. (2021). *analisis kebijakan*. universitas negeri makassar: badan penerbit UNM.
- Badriyah, s. (2021). *implementasi: pengertian, tujuan, dan jenis-jenisnya*. Retrieved from www.gamedia.com:https://www.gamedia.com/literasi/implementasi/
- Bantuan langsung tunai*. (2023, desember 13). Retrieved from wikipedia: https://id.m.wikipedia.org/wiki/bantuan_langsung_tunai
- Dihuma, a. (2023, maret 21). *penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) Tahun 2023*. Retrieved from [mangunggu.digitaldesa: https://manunggu.digitaldesa.id/berita/penyerahan-bantuan-langsung-tunai-blt-tahun-2023](https://manunggu.digitaldesa.id/berita/penyerahan-bantuan-langsung-tunai-blt-tahun-2023)
- Dian Suluh Kusuma Dewi, M. (2022). *kebijakan publik proses, implementasi dan evaluasi*. In *buku ajar kebijakan publik* (p. 43). bantul DI Yogyakarta: penerbit samudra biru .



- H. Tachjan, M. (2006). implementasi kebijakan publik. In *implementasi kebijakan publik* (pp. 39-41). Bandung: APII Bandung.
- Handoyo, e. (2012). *kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya Semarang.
- Hj. RULINAWATY KASMAD, S. M. (n.d.). *studi implementasi kebijakan publik*.
- Indonesia, m. k. (2021). peraturan menteri keuangan republik indonesia.
- Indonesia, m. k. (2021). peraturan menteri keuangan republik indonesia.
- Iswara, a. j. (2022, agustus 18). *apakah indonesia negara berkembang atau maju?* Retrieved from kompas.com: <https://amp.kompas.com/internasional/read/2022/08/18/175700170/apakah-indonesia-negara-berkembang-atau-maju>
- Keuangan, m. (2021, september 13). *peraturan menteri keuangan no 123/pmk.02 tahun 2021*. Retrieved from jdih.maritim.go.id: <https://jdih.maritim.go.id/id/permenkue-no-123-pmk02-2021>
- Kurnia, f. (2023, ferbruari 13). *analisis data: definisi, jenis, model, sampai prosedurnya*. Retrieved from dailysocial: <https://dailysocial.id/post/analisis-data>
- Larasti prayoga, M. M. (2021). faktor kemiskinan di kabupaten sidoarjo. *jambura economic education jurnal*.
- Marlita, l. (2022). evaluasi penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di kecamatan teupah selatan kabupaten simeule. *leni marlita 180403026*, 1-107.
- Menteri desa, p. d. (2020). peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia nomor 14 tahun 2020.
- Nugraha, a. (2020, 04 30). *blt-dana desa rawan maladministrasi*. Retrieved from ombudsman.go.id: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--blt-dana-desa-rawan-maladministrasi>
- Prastiti, s. d. (2020). analisis masalah penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin di desa kotaraja kecamatan sikur kabupaten lombok utara. *cover bab III*, 1-68.
- RI, B. (2023, juni 26). *jadwal cair BLT dana desa 2023, bisa dicairkan sekaligus setiap 3 bulan*. Retrieved from aceh.bpk.go.id: <https://aceh.bpk.go.id/jadwal-cair-blt-dana-desa-2023-bisa-dicairkan-sekaligus-setiap-3-bulan>
- RI, B. (2023, februari 20). *terkait besaran dan kriteria penerima blt-dd tahun 2023, ini penjelasan kepada dpmd*. Retrieved from sumsel.bpk.go.id: <https://sumsel.bpk.go.id/2023/02/20/terkait-besaran-dan-kriteria-penerima-blt-dd-tahun-2023-ini-penjelasan-kepala-dpmd-banyuasin/>
- Shafritz, J. R. (2017). *introducing Administration Publik*. Taylor & Prancis: Abingdon.
- Wahyuni, w. (2022, oktober 11). *tahapan pembuatan kebijakan*. Retrieved from www.hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tahapan-pembuatan-kebijakan-publik-lt63452ddb789b0/>